

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Rinda Luthfiana

Universitas Islam An Nur Lampung
rindaluthfiana8888@gmail.com

Abstract

School-based management (SBM) is an education management model that gives autonomy to schools to determine school policies in order to improve the quality, efficiency, and equity of education. MBS is expected to improve the quality of learning, including Islamic Religious Education (PAI) learning. This study aims to examine the implementation of MBS in an effort to improve the quality of Islamic Education learning. This research uses a qualitative research method with a case study approach. The research subject was SMKS Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan. The results showed that the implementation of MBS at SMKS Dr. Indra Adnan Indragiri College has been going well. This can be seen from the active participation of various parties, namely the principal, teachers, students, parents, and the community. This participation is manifested in various activities, such as school program preparation, learning implementation, and learning evaluation. The implementation of MBS at SMKS Dr. Indra Adnan Indragiri College has positively affected the quality of PAI learning. This can be seen from the increase in student learning outcomes, the increase in student learning motivation, and the increase in students' spiritual and social attitudes. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of MBS can be one of the efforts to improve the quality of PAI learning.

Keywords:

Manajemen Berbasis Sekolah
Mutu Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam

Abstrak

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan. MBS diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, termasuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi MBS dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian adalah SMKS Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBS di SMKS Dr. Indra Adnan Indragiri College telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Partisipasi ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan, seperti penyusunan program sekolah, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Implementasi MBS di SMKS Dr. Indra Adnan Indragiri College telah berpengaruh positif terhadap mutu pembelajaran PAI. Hal ini terlihat dari meningkatnya hasil belajar siswa, meningkatnya motivasi belajar siswa, dan meningkatnya sikap spiritual dan sosial siswa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi MBS dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran PAI.

Corresponding Author:

Rinda Luthfiana
Fakultas Tarbiyah/MPI
Universitas Islam An Nur Lampung
rindaluthfiana8888@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹

Sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu bangsa yang bertaqwa kepada Allah, berilmu amaliah, dan beramal ilmiah, merupakan salah satu tujuan dari pendidikan ini dengan harapan bangsa ini mampu berpartisipasi dalam persaingan global yang semakin ketat. Fenomena yang terjadi saat ini ditandai dengan rendahnya kualitas lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas atau cenderung tamal sulam, bahkan lebih berorientasi pada proyek. Namun, saat ini, kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu, sering kali dampak lanjutan dari sekolah membuat frustrasi daerah setempat. Dengan adanya pergeseran dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Sifat lulusan pelatihan yang kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kemajuan, baik industri, perbankan, media komunikasi, dan iklan-iklan kerja daerah lainnya yang pada umumnya akan menantang keberadaan sekolah. Jika dilihat dari segi moral, akhlak, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa, sumber daya manusia yang dipersiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus pun belum sepenuhnya memuaskan.²

Munculnya perspektif seperti itu dipengaruhi oleh kondisi riil yang dialami oleh masing-masing perkumpulan melalui kuantitas lulusan yang belum terserap pada posisi-posisi yang dapat diakses. Dalam konteks era globalisasi saat ini, masyarakat pada dasarnya telah menyadari bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan.

Salah satu upaya yang disebut-sebut meluas seperti yang diungkapkan oleh Rahman adalah dengan diberlakukannya peraturan nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Provinsi yang menyatakan bahwa kemandirian instruksional bergantung pada desentralisasi, dengan pendekatan administrasi berbasis sekolah (MBS). Pendekatan MBS diharapkan dapat mendorong kebebasan dan inovasi inisiatif kepala sekolah yang solid dan layak. Amanat undang-undang tersebut seharusnya menjadi landasan dan panduan bagi pengembangan sekolah di masa depan.³

Pemberian kemandirian instruksional yang luas kepada sekolah merupakan kecemasan otoritas publik terhadap efek samping yang muncul di mata publik serta upaya untuk memperbaiki sifat pelatihan secara keseluruhan. Pemberian kemandirian ini menuntut pendekatan administrasi yang lebih disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada saat ini dalam strukturnya, MBS hadir sebagai sebuah pilihan yang berbeda dengan pandangan baru tentang pelatihan yang diiklankan oleh dewan. MBS adalah sebuah ide yang menawarkan kemandirian kepada sekolah untuk menentukan strategi sekolah untuk meningkatkan kualitas, kemahiran dan nilai pelatihan yang sesuai dengan keinginan daerah setempat dan menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, jaringan dan pemerintah.

Mendidik dan belajar adalah siklus yang sangat membingungkan, dengan alasan bahwa dalam prosesnya peserta didik tidak hanya mendapatkan dan menyimpan data yang disampaikan oleh pendidik, namun peserta didik dapat melibatkan diri mereka sendiri dalam latihan belajar dan kegiatan pendidikan yang harus diselesaikan, sehingga hasil pembelajaran lebih baik dan memenuhi pedoman publik.

Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta didik karena MBS memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas profesionalisme yang dimiliki dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

² Umaedi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MMBS/M), CEQM, 2004 hal. 1

³ Rahman, Manajemen Pendidikan Islam Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah, (2005) hal. 2

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana implementasi manajemen berbasis sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam di SMKS Indra Adnan college.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan pada latar belakang individu secara utuh (holistic) tanpa mengisolasi individu dan organisasi dalam variable tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁴ Penelitian kualitatif sering pula disebut etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik.⁵

Secara umum, penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip deskriptif analitik/analisis deskriptif. Analisis deskriptif dipahami sebagai suatu bentuk analisis yang ditujukan kepada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang. Dikatakan analitik karena pada penelitian ini intinya adalah menganalisa pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama islam dan faktor-faktor yang mendorong dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi tersebut. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.⁶

Penelitian ini adalah memahami proses penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama islam di SMKS Dr. Indra Adnan Indragiri College. Sasaran yang hendak dicapai adalah memaknai proses pelaksanaan manajemen berbasis sekolah tersebut. Oleh karena itu metode yang dianggap cocok adalah pendekatan kualitatif. Melalui metode kualitatif ini diharapkan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fakta yang relevan dalam penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu pendidikan dan manajemen pendidikan, antara lain manajemen mutu terpadu dalam pendidikan, manajemen berbasis sekolah. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya) berdasarkan fakta yang tampil apa adanya (paradigma natural).⁷

3. PEMBAHASAN

A. Definisi Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah MBS merupakan interpretasi langsung dari School-Based Administration yang secara luas menyiratkan cara politis untuk menangani peningkatan asosiasi sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada anggota sekolah di tingkat terdekat untuk bekerja di sekolah.⁸

Sementara itu, Myers dan Stonehill berpendapat bahwa MBS adalah sebuah prosedur untuk mengembangkan lebih lanjut pelatihan dengan memindahkan otoritas dinamis yang kritis dari negara bagian dan lingkungan ke sekolah-sekolah individual dengan mengijinkan direktur, pendidik, pengganti, wali murid, dan jaringan untuk memiliki komando yang lebih besar dalam siklus instruksional dan memberi mereka tanggung jawab terkait dengan aset, staf, dan program pendidikan.⁹

MBS dapat meningkatkan kerja sama daerah, nilai, produktivitas, dan administrasi berbasis sekolah.¹⁰ Hal ini sesuai dengan perspektif Halinger yang dirujuk oleh Abu Duhou bahwa MBS menggabungkan model pengaturan untuk penyampaian pelatihan di mana kekuasaan dan kewajiban terkait dengan pekerjaan sekolah yang sebenarnya dibagi di antara kantor pusat (Dinas, Divisi Pengajaran, tempat kerja propinsi, spesialis pengajaran di dekatnya, dan sebagainya), dan perwakilan berbasis sekolah (pendidik, kepala sekolah, komite pendidikan, dan sebagainya) yang semuanya bekerja sebagai tenaga ahli dan mitra yang saling bekerjasama.¹¹

Sebaliknya, Sagala menegaskan bahwa MBS memiliki esensi kewenangan yang lebih besar (otonomi) dalam mengelola dan memberdayakan sekolah tanpa harus berpusat pada diri sendiri, sehingga dapat meningkatkan kemandirian, kecerdasan, dan kreativitas sekolah. Kemandirian ini memungkinkan sekolah untuk mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.¹²

⁴ Loexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3.

⁵ Nana Sujana, dk., *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), hal. 195

⁶ Winarno Surachmad, *Metode Penelitian*, (Bandung : Tarsito, 1990), hal. 40

⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesaresan, 2000), hal. 147.

⁸ Priscilia Wohlstetter dan Susan Albers Mohrman, *Assessment of School-Based Management: Studies of Education Reform*, (U.S. A: Departement of Education Office of Education Research dan Improvement, 1996.), hal 7

⁹ Dorothy Myers and Robert Stonehill. *School Based Management*. Office of Research Education: Consumer Guide. 1993.

¹⁰ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Adicita Kaya, 2001) hal.160

¹¹ Ibtisam Abu-Duhou. *School-Based Management (terjemahan)*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hal 17

¹² Syaiful Sagala. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat. Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. (Jakarta: Nimau Multima, 2004) hal, 134

Investor biasanya terdiri dari para pendidik, direktur; beberapa program MBS juga melibatkan wali murid, pengganti, dan masyarakat setempat. Kepala sekolah dan guru memiliki banyak kebebasan untuk mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan kewenangan pemerintah, sesuai dengan konsep MBS, melalui strategi-strategi sebagai berikut: a) rencana pendidikan yang komprehensif, (b) pengalaman pendidikan yang berhasil, (c) iklim sekolah yang mantap, (d) aset yang adil, dan (e) normalisasi di wilayah tertentu, pengamatan, penilaian, dan pengujian.¹³

Kelima metodologi ini akan dikoordinasikan dengan kemampuan sekolah, sehingga menghasilkan pengembangan bagian-bagian dari manajemen berbasis sekolah, yaitu: (1) manajemen; (2) proses belajar mengajar; (3) sumber daya manusia; dan (4) administrasi sekolah. Fokus, Arah, dan Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) MBS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan, karena sekolah dan masyarakat tidak lagi harus menunggu perintah dari pusat. Sebaliknya, mereka dapat menciptakan visi pendidikan yang didasarkan pada kondisi daerah dan mewujudkannya sendiri.

Hal ini digarisbawahi oleh Supriono dan Sapari bahwa alasan melaksanakan MBS adalah untuk lebih mengembangkan keefektifan dewan sekolah serta kualitas dan pentingnya pelatihan di sekolah.¹⁴ Nurkholis menyatakan sebelumnya bahwa tujuan MBS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke tingkat yang luar biasa. Hal ini dicapai dengan memfokuskan pada kualitas pengajaran, kualitas kurikulum, kualitas pengalaman siswa sehari-hari, kualitas staf pengajar, dan kualitas pendidikan itu sendiri ke tingkat yang luar biasa.¹⁵

Sementara itu, Slamet PH menyatakan bahwa alasan dari administrasi berbasis sekolah adalah untuk melibatkan sekolah, khususnya SDM (direktur, pendidik, perwakilan, wakil, pengganti, wali murid, dan area lokal yang melingkupi) melalui pengaturan kekuatan, kemampuan beradaptasi, dan aset yang berbeda untuk menangani masalah-masalah yang terlihat oleh sekolah yang bersangkutan.¹⁶

Nanang Fattah menggarisbawahi kerjasama daerah setempat dengan menyatakan bahwa MBS mengutamakan emas dan dukungan daerah setempat atau mitra memiliki model kontribusi yang tinggi, di mana model ini memberikan sistem yang esensial bahwa setiap komponen akan benar-benar ingin mengambil bagian dalam bekerja untuk meningkatkan kualitas, efektifitas, dan nilai instruksional yang terbuka.¹⁷

Kemudian, pada saat itu, Kathleen Kubick mengatakan, "*School Based Administration is an option in contrast to the common example of school region administration that unifies expert in the local office*".⁶ Maksudnya MBS adalah alternatif terhadap pola khusus dinas sekolah suatu daerah yang memusatkan wewenang di kantor daerah. Peterson menambahkan, "*school based management (SBM) programs decentralize districts' decision by locating them in the school. Shareholder normally include teachers, and principals; some SBM programs reach out as well to parents, student, and other community members*".¹⁸ Hal ini menyiratkan bahwa program-program manajemen berbasis sekolah mendesentralisasikan pilihan-pilihan lingkungan dengan menemukan pilihan-pilihan terdekat di sekolah. Mitra biasanya terdiri dari instruktur, direktur; beberapa program MBS juga menjangkau orang tua, siswa, dan anggota masyarakat lainnya.

Myers dan Stonehill menyatakan bahwa alasan pelaksanaan MBS memberikan beberapa manfaat, (a) memungkinkan individu-individu yang terampil di sekolah untuk mengejar pilihan yang dapat mengembangkan ilustrasi lebih lanjut, (b) memberikan pintu terbuka bagi seluruh area lokal sekolah untuk melakukan pilihan-pilihan yang signifikan, (c) memusatkan perhatian pada pertanggungjawaban atas pilihan-pilihan yang dibuat, (d) mendorong imajinasi dalam rencana program, (e) mengalihkan aset untuk membantu pencapaian tujuan yang dibuat oleh masing-masing sekolah, (f) mendorong rencana keuangan yang tulus sehingga wali murid dan instruktur tahu tentang status keuangan sekolah, batas pengeluaran dan biaya proyek, dan (g) lebih lanjut mengembangkan tekad instruktur dan mendukung kebangkitan pionir-pionir baru.¹⁹

Tujuan dari MBS adalah untuk lebih mudah memahami bagaimana strategi pemerintah dan dewan yang terdesentralisasi dapat menerapkan metodologi baru, khususnya dalam pendidikan dan pembelajaran, matematika, sains dan investigasi sosial, untuk menciptakan prestasi sekolah menengah. Pada dasarnya, target MBS dapat diringkas menjadi lima hal, yaitu: (1) mengupayakan sifat pelatihan pengawasan dan dorongan sekolah dalam mengawasi dan memanfaatkan aset yang dapat diakses, (2) memperluas keakraban dengan penghuni sekolah dan lingkungan sekitar di sekolah. memberikan pengajaran melalui pengarahan, (3) memperluas tanggung jawab sekolah kepada wali, daerah setempat dan otoritas publik sehubungan dengan

¹³ Fauli Jalal dan Dedi Supriadi. Op.cit. hal 161

¹⁴ Supriono S dan Achmad Sapari. *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Jawa Timur: SIC, 2001) hal, 5

¹⁵ Nurkholis. *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Jakarta: Gramedia, 2003) hal 23-24

¹⁶ Slamet PH, *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Jurnal Pendidikan dan kebudayaan no.27 tahun 2000).,611

¹⁷ Nanang Fattah. *Konsp Manajemen Berbasis Sekolah alan Dewan Seko/ah7*.(Bandung: Bani Quaaaisy, 2003) hal, 12

¹⁸ David Peterson. *School-Based management and Student Performance*. (ERIC Digest Number 62, Eugene; ERIC Clearinghose on Education Management Eugene OR, 1991), hal. 1.

¹⁹ Dorothy Myers and Robert Stonehill. *opcit*.

kualitas sekolah, (4) memperluas persaingan sehat antar sekolah untuk mencapai sifat normal pengajaran, dan (5) memungkinkan kemampuan sekolah yang ada untuk menciptakan alumni yang produktif dan produktif.

Sesuai dengan gagasan MBS, kepala sekolah dan pendidik mempunyai kesempatan yang luas dalam mengawasi sekolah tanpa mengabaikan pendekatan dan kewenangan pemerintah melalui teknik-teknik seperti berikut: (a) program pendidikan yang komprehensif, (b) pengajaran yang kuat dan pengalaman yang berkembang, (c) iklim sekolah yang baik, menjunjung tinggi, (d) harta dalam pandangan ekuitas, dan (e) normalisasi dalam hal-hal tertentu, pemeriksaan, penilaian dan.²⁰ Untuk menciptakan komponen manajemen berbasis sekolah, lima strategi berikut akan diterapkan bersamaan dengan fungsi manajemen sekolah: 1) dewan, (2) pendidikan dan pengalaman pendidikan, (3) SDM, dan (4) organisasi sekolah. Secara lebih jelas komponen-komponen itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Komponen-Komponen Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen	PBM	SDM	Sumber Daya Dan Administrasi
Menyediakan manajemen /organisasi/kepemimpinan sekolah	Meningkatkan mutu belajar siswa	Menyebarkan staf dan menempatkan personel yang dapat memenuhi kebutuhan semua siswa	Mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan
Menyusun rencana sekolah dan Merumuskan kebijakan	Menyusun kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan para siswa	Memilih staf yang memiliki wawasan MBS	Mengelola alokasi dan aset sekolah
Mengelola operasional sekolah	Menawarkan pengajaran yang efektif	Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf	Menyediakan dukungan administratif
Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait (<i>school community</i>)	Menyediakan program pengembangan pribadi siswa	Menjamin kesejahteraan staf dan siswa	Mengelola
Mendorong partisipasi masyarakat		Mengatur pembahasan tentang kinerja sekolah	
Menjamin terpeliharanya sekolah yang akuntabel			

Sumber: Kelompok Kerja Manajemen Berbasis Sekolah

B. Tujuan MBS

MBS berencana untuk bekerja pada sifat pelatihan, khususnya di daerah, karena sekolah dan jaringan tidak harus menunggu perintah dari pusat, namun dapat menumbuhkan visi instruktif yang sesuai dengan keadaan lokal dan melaksanakan visi instruktif secara mandiri. Hal ini ditegaskan oleh Supriyono dan Sapari bahwa tujuan pelaksanaan MBS adalah untuk meningkatkan kemampuan para pelaksana serta

²⁰ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. Op.cit. hal 161

kualitas dan pentingnya pelatihan di sekolah.²¹

Lebih lanjut, Nurkolis mengutarakan, maksud pelaksanaan MBS adalah mengupayakan hakikat pelatihan sebagai kaidah umum, baik hakikat pembelajaran, hakikat rencana pendidikan, hakikat SDM, kedua pendidik dan instruktif lainnya. staf, dan sifat administrasi instruktif secara keseluruhan.²²

Sementara itu, Slamet PH menyatakan bahwa tujuan manajemen berbasis sekolah adalah memberdayakan sekolah, khususnya sumber daya manusianya kepala sekolah, guru, pegawai, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar dengan memberikan kewenangan, keleluasaan, dan lain-lain. sumber daya untuk memecahkan masalah.²³

Menurut Nanang Fattah, MBS bertujuan untuk memastikan otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan memiliki model keterlibatan yang tinggi. Model ini memberikan kerangka dasar bahwa setiap elemen akan mampu berperan dalam peningkatan kualitas, efisiensi, dan pemerataan kesempatan pendidikan. Nanang Fattah lebih menekankan pada partisipasi masyarakat.²⁴ Menurut Myers dan Stonehill, penerapan MBS bertujuan untuk memberikan sejumlah manfaat, antara lain sebagai berikut: (a) memungkinkan individu yang kompeten di sekolah mengambil keputusan yang dapat meningkatkan pembelajaran; (b) memberikan kesempatan kepada seluruh warga sekolah untuk mengambil keputusan besar; (c) fokus pada tanggung jawab atas keputusan yang diambil; (d) mengarahkan kreativitas dalam perancangan program; (e) mengarahkan sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan yang dikembangkan masing-masing sekolah; (f) mengarahkan anggaran riil agar orang tua siswa dan.²⁵

Kemudian, pada saat itu, *University of Southern California* menyatakan bahwa tujuan MBS adalah untuk lebih memahami bagaimana administrasi yang terdesentralisasi dan komponen dewan dapat menegakkan cara-cara baru untuk menangani pendidikan dan kemajuan terutama di bidang matematika, sains, dan ujian sosial, untuk mewujudkan sekolah pelaksana yang unggul.²⁶ Tujuan dari MBS adalah untuk lebih memahami bagaimana pemerintah yang terdesentralisasi dan metodologi eksekutif dapat menerapkan metodologi baru, khususnya dalam pendidikan dan pembelajaran, dalam bidang ujian aritmatika, sains dan sosial, untuk mencapai prestasi sekolah menengah. Dari beberapa tujuan yang dikemukakan di atas, secara mendasar tujuan MBS dapat direduksi menjadi lima hal, yaitu: (1) mengupayakan sifat pelatihan pengawasan dan dorongan sekolah dalam mengawasi dan mengaktifkan aset yang dapat diakses, (2) memperluas keakraban dengan penghuni sekolah dan daerah setempat dalam memberikan pendidikan melalui navigasi, (3) memperluas tanggung jawab sekolah kepada wali, daerah setempat dan otoritas publik sehubungan dengan kualitas sekolah, (4) memperluas persaingan yang solid antar sekolah untuk mencapai sifat normal dari pelatihan, dan (5) memanfaatkan kemampuan sekolah yang ada untuk menghasilkan lulusan yang sukses dan berdaya.

Dapat dipastikan bahwa MBS menyasar sekolah bermutu terpadu berdasarkan lima tujuan MBS yang tercantum di atas. Arcaro menyatakan bahwa “pilar mutu” menjadi ciri kriteria sekolah bermutu terpadu.²⁷

Di sekolah yang berkualitas, setiap orang adalah klien sekaligus penyedia. Khususnya, klien adalah pelajar dan keluarganya. Kewajiban sekolah bermutu yang terkoordinasi adalah bekerja sama dengan wali dalam mengefektifkan kemampuan siswa untuk memanfaatkan pengalaman yang berkembang di sekolah. Sekolah mempunyai klien dalam dan luar, dimana klien dalam adalah wali, siswa, guru, ketua, staf dan komite pendidikan di dalam sistem sekolah. Klien luar adalah masyarakat, keluarga, militer, organisasi, berbagai asosiasi yang menggunakan hasil siklus instruktif.²⁸ Karena manajemen mutu terpadu juga merupakan tanggung jawab setiap orang, setiap orang harus berkontribusi terhadap upaya mutu. Untuk menentukan adanya upaya nilai dalam administrasi, estimasi merupakan salah satu bagian yang sebaiknya dilaksanakan secara ideal, namun pelaksanaannya seringkali gagal. Hal ini karena penilaian mutu hanya mempertimbangkan hasil sekolah dibandingkan prestasi siswa melalui hasil ujian. Akibatnya, setiap data yang diperlukan untuk upaya kualitas harus dianalisis. Satu hal lagi yang penting dalam administrasi mutu yang terkoordinasi adalah tanggung jawab yang dimiliki sekolah dalam proses perubahan mutu. Oleh karena itu setiap orang perlu membantu upaya yang berkualitas. Individu pada umumnya merasa sulit untuk melakukan perubahan, namun para eksekutif harus menjunjung tinggi interaksi perubahan dengan memberikan instruksi, perangkat, kerangka kerja, dan siklus untuk bekerja pada kualitas. Bagian penting lain dari administrasi mutu terpadu adalah melakukan perbaikan tanpa henti dengan mengelola masalah

²¹ Supriono S dan Achmad Sapari. *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Jawa Timur: SIC, 2001) hal, 5

²² Nurkolis. *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Jakarta: Gramedia, 2003) hal 23-24

²³ Slamet PH, *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Jurnal Pendidikan dan kebudayaan no.27 tahun 2000),.611

²⁴ Nanang Fattah. *Konsep Manajemen Berbasis sekolah dan Dewan Sekolah*.(Bandung: Bani Quraisy, 2003) hal,12

²⁵ Dorothy Myers and Robert Stonehill. *opcit*.

²⁶ University of Southern California. *Study Aims and Study Questions An International study of School-Based Management*, (2004), hal. 3

²⁷ Jerome S. Arcaro. *Pendidikan Berbasis Mutu. (terjemahan)*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal 14-15

²⁸ *Ibid*. hal. 40.

yang muncul, mencari cara untuk lebih mengembangkan siklus yang tercipta, dan melakukan perbaikan penting.

C. Strategi Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

Berdasarkan tinjauan Bank Dunia, keadaan sekolah di Indonesia mencakup tiga klasifikasi, yaitu sekolah menengah atas, sekolah pusat, dan sekolah malang, dan dari klasifikasi tersebut terdapat setidaknya tiga derajat model administrasi berbasis sekolah, yaitu khususnya: (a) sekolah yang dapat melaksanakan MBS secara tuntas, (b) sekolah dengan tingkat MBS sedang (sedang), dan (c) sekolah dengan MBS yang diabaikan. Dalam kondisi seperti ini, penyelenggaraan MBS di masing-masing sekolah tentu tidak setara, karena ini menyangkut aset yang dimiliki. Kondisi sekolah juga sangat bervariasi tergantung di mana mereka berada, dengan sekolah di perkotaan dan sekolah di pedesaan menunjukkan variasi yang paling besar.²⁹

Dituturkan Mulyasa, dukungan orang tua itu berbeda-beda, mulai dari bunga tinggi hingga investasi rendah, bahkan tidak ambil bagian sama sekali. Oleh karena itu, agar MBS dapat terselenggara secara ideal, perlu adanya sistem pengumpulan yang disesuaikan dengan kapasitas pengurus masing-masing sekolah. Untuk lebih jelasnya pengelompokan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Kelompok Sekolah Dalam MBS

Kemampuan sekolah	Kepala Sekolah Dan Guru	Partisipasi masyarakat	Pendapatan Daerah Dan Orang Tua	Anggaran Sekolah
Manajemen tinggi	Berkompetensi tinggi (termasuk kepemimpinan)	Tinggi (termasuk dukungan dana)	Tinggi	Besar
Manajemen sedang	Berkompetensi sedang (termasuk kepemimpinan)	Sedang (termasuk dukungan dana)	Sedang	Sedang
Manajemen rendah	Berkompetensi rendah (termasuk kepemimpinan)	Kurang (termasuk dukungan dan)	Rendah	Kecil atau tidak ada

Sumber: Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah: 2003

Keadaan di atas menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pengurus sekolah dalam melaksanakan MBS tidak sama satu sama lain. Perbedaan dalam kapasitas administrasi memerlukan perlakuan yang berbeda untuk setiap sekolah yang disesuaikan dengan kapasitas khusus mereka dalam menjadikan MBS sebagai pandangan dunia lain dalam pelatihan. Dalam mengkoordinasikan MBS diperlukan perangkat dan prosedur dalam penyelenggaraannya. Sagala mengungkapkan, perangkat dan sistem MBS antara lain: (a) melaksanakan program sekolah sesuai dengan mimpi dan misi yang mantap dengan tujuan dan sasaran, (b) menumbuhkan mitra sekolah dari berbagai daerah, seperti pionir daerah dan LSM, (c) mengklasifikasikan kembali hubungan antar kaki tangan, (d) perjumpaan dan penguatan antar kerangka dan antar organisasi sekolah, (e) menjelaskan kemampuan dan tugas masing-masing tingkatan dan kerangka penghibur, (f) menetapkan batasan kekuasaan dan tanggung jawab bagi setiap penghibur, (g) menjadikan perangkat gadget vital, (h) memenuhi kebutuhan data sekolah, dan (i) mengedarkan kekuasaan, kewajiban, dan aset ke tingkat bawahan. Sementara itu, menurut Fasli dan Dedi Supriadi, rapat kerja MBS menyampaikan bahwa diperlukan tiga tahapan dalam metodologi pelaksanaan MBS, yaitu (a) sistem sementara, (b) prosedur jangka menengah, dan (c) teknik jangka panjang.³⁰ Sementara itu, Priscilla Wohlstetter dan Susan A. Mohrman menyatakan enam metode penerapan MBS adalah sebagai berikut:

- a) memberikan tugas penting bagi pendidik dalam pertemuan yang dinamis, berpusat pada peningkatan yang konsisten dengan persiapan yang luas dalam pengerjaan dan penanganan kemampuan, seperti program pendidikan dan bidang mendidik,
- b) membuat kerangka kerja yang layak untuk membagi data tentang tingkat hubungan sekolah antar warga,
- c) menumbuhkan cara-cara yang lebih berdaya dalam memberikan hadiah sebagai arahan metodologi staf dalam mencapai tujuan sekolah,

²⁹ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. Op.cit., hal 161

³⁰ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. Op.cit.,hal, 163

- d) memilih administrator sekolah yang dapat berubah dan bekerja dengan dewan, dan
 e) dimanfaatkan secara lokal, negara bagian/atau secara luas sebagai aturan nol dalam upaya mengakomodasi dan mengubah fokus program dan pengajaran pendidikan.³¹

Sementara itu Oswald berpendapat agar MBS berjalan sukses perlu memperhatikan beberapa strategi yaitu: (a) *Principal must use a team approach to decision making*, (b) *teachers will feel more positive toward school leaders and more committed to school goals and objectives*, (c) *Parents and community members will be more supportive of schools because they have more of say over decisions*.³² Artinya (a) kepala sekolah harus menggunakan pendekatan kelompok dalam mengambil keputusan, (b) guru harus mempunyai sikap yang lebih positif terhadap kepemimpinan sekolah dan lebih terlibat dalam maksud dan tujuan sekolah, dan (c) orang tua dan anggota masyarakat harus mendukung sekolah karena mereka memiliki lebih banyak masukan dalam pengambilan keputusan. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa karena setiap sekolah mempunyai lingkungan internal dan eksternal yang unik, tidak ada dua sekolah yang dapat menerapkan strategi penerapan MBS yang sama. Hanya saja setiap sekolah terus berusaha memastikan bahwa strategi yang ditawarkan dapat digunakan dengan sumber daya yang tersedia untuk memaksimalkan MBS.

D. Tahapan-tahapan dalam Pelaksanaan MBS

Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi (kemerdekaan daerah) dan selanjutnya berbagai undang-undang Tidak Resmi yang terdapat dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintahan, Umum dan Kewenangan Kota/Rezim, maka Dinas Pengarahan Umum melalui Direktorat Sekolah Pembantu Tingkat Dasar telah diberikan empat buku pedoman pelaksanaan MBS, dan masing-masing buku berisi aturan-aturan pelaksanaan MBS dengan memberikan contoh organisasi hingga latihan perencanaan. Pada buku pertama terdapat sembilan tahapan pelaksanaan MBS yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan kondisi sekolah tanpa mengganggu otonomi sekolah.³³ Tahapan-tahapan tersebut:

Tabel 3: Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

No	Tahapan	Pengertian	Kegiatan yang Dilaksanakan
1	Melakukan sosialisasi	Memahami konsep MBS tentang “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana”	-Memahami sistem, budaya dan sumberdaya yang ada di sekolah dan refleksikan kecocokannya untuk mendukung penyeleng- garaan MBS -identifikasi sistem, budaya, dan sumberdaya yang perlu diperkuat dan yang perlu diubah dan mengenalkannya untuk menyelenggarakan MBS -buatlah komitmen secara rinci yang diketahui oleh semua unsur yang bertanggungjawab, jika terjadi perubahan sistem, budaya, dan sumberdaya yang cukup mendasar
2	Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekolah	Visi adalah pandangan jauh ke depan kemana sekolah akan dibawa Misi adalah tindakan untuk mewujudkan /merealisasikan visi. Tujuan merupakan tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah dican- gkan. Sasaran adalah penjabaran tujuan, yaitu sesuatu yang dihasilkan sekolah	-Penyusunan rencana pengembangan sekolah, melalui: -penentuan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek -mengidentifikasi tantangan nyata sekolah -menentukan skala prioritas berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan

³¹ Priscilia Wohlstetter dan Susan Albers Mohrman. *Op.cit.* hal. 15

³² Lori Jo Oswald. *School-Based Management: ERIC Digest Number 99*. Eugene: ERIC Clearinghouse on Education Management, 1995), hal.2

³³ Direktorat SLTP, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. (Jakarta: Direktorat SLTP, 2002) hal. 31-46

		dalam jangka waktu lebih singkat.	
3	Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran	Menentukan fungsi-fungsi yang dilibatkan untuk mencapai sasaran dan juga meneliti tingkat kesiapannya	-Menentukan pelaksanaan pembelajaran seperti pengembangan kurikulum, perencanaan dan evaluasi -Menentukan program ketenagaan -Menentukan program kesiswaan -Menentukan alokasi keuangan -menentukan pengembangan iklim akademik -menentukan pengembangan fasilitas -menentukan program hubungansekolah dengan masyarakat
4	Melakukan analisis SWOT	Untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran	-Mengenal dan menentukan faktor internal yang sesuai dengan keadaan sekolah -Mengenal dan menentukan faktor eksternal yang mendukung kondisi sekolah
5	Alternatif langkah pemecahan masalah	Memilih langkah-langkah pemecahan sekolah berdasarkan hasil analisisSWOT	-Mengubah ketidaksiapan setiap fungsi menjadi kesiapan fungsi dengan mengatasi makna kelemahan dan ancaman agar menjadi kekuatan dan peluang
6	Menyusun rencana dan program peningkatan mutu		-Membuat rencana jangka pendek, menengah dan panjang
7	Melaksanakan Rencana Peningkatan Mutu		-Membuat kegiatan yang sesuai dengan sasaran.
8	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program	-Menyusun laporan teknis dan laporan keuangan
9	Merumuskan Sasaran Baru	Disesuaikan dengan hasil evaluasi	-Menentukan sasaran baru, dan melakukan analisis SWOT

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

SDM merupakan bagian yang sangat penting dan prinsipil dalam memajukan negara, oleh karena itu pengembangan SDM lebih lanjut harus dilakukan secara berkelanjutan. Lembaga pendidikan merupakan bagian penting dalam pengerjaan SDM, khususnya lembaga pendidikan formal atau sekolah. Sekolah pada era otonomi saat ini, sangat dibutuhkan peningkatannya dalam meningkatkan sumber daya manusia, adanya pola manajemen berbasis sekolah memberi harapan besar bagi sekolah untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan kondisi sekolah. Oleh karena itu hasil dari pelaksanaan MBS di setiap sekolah tidak bisa sama. Tetapi semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sekolah yang berkualitas.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih fleksibel untuk penerapan MBS. Regulasi yang fleksibel akan memberikan ruang bagi sekolah untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.
2. Pemerintah perlu memberikan dukungan pendanaan yang lebih memadai untuk penerapan MBS. Pendanaan yang memadai akan membantu sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, serta mengembangkan program pendidikan yang inovatif.

3. Pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan bagi kepala sekolah dan guru dalam penerapan MBS. Pelatihan ini akan membantu kepala sekolah dan guru untuk memahami konsep dan prinsip MBS, serta menerapkannya secara efektif
4. Masyarakat perlu berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan MBS di sekolah. Pengawasan masyarakat akan membantu memastikan bahwa MBS diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuannya.
5. Sekolah perlu mengembangkan perencanaan yang matang untuk penerapan MBS. Perencanaan yang matang akan membantu sekolah untuk mencapai tujuannya secara efektif.
6. Sekolah perlu melakukan pelaksanaan yang efektif untuk penerapan MBS. Pelaksanaan yang efektif akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan.
7. Sekolah perlu melakukan evaluasi yang berkelanjutan untuk penerapan MBS. Evaluasi yang berkelanjutan akan membantu sekolah untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan MBS, serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya yang telah membimbing langkah-langkah saya dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada dosen-dosen di Universitas Islam An-Nur Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama masa perkuliahan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ketua yayasan, kepala sekolah, wakil kurikulum, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam serta siswa-siswi SMKS Dr. Indra Adanan Indragiri College yang telah memberikan data-data penelitian yang penulis butuhkan sehingga penelitian ini bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

REFERENSI

- Abu-Duhou, Ibtisam. *School-Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah)* Terjemahan. Jakarta: Logos, 2002
- Arcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu (terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Cotton, Kathleen. *School-Based Management*. Northwest: Regional Educational Library, 2001
- Direktorat Pendidikan Dasar Menengah Umum. *Penyelenggaraan School reform dalam Konteks MPMB di SMU*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar Menengah, 2002
- Direktorat Pendidikan Nasional. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 1. Konsep Dasar*. Jakarta : Direktorat SLP Dirjen Dikdasmen, 2002
- _____. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 2. Rencana dan Program Pelaksanaan*. Jakarta: Direktorat SLP Dirjen Dikdasmen, 2002
- Fattah, Nanang. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. Bandung: BaniQuraisy, 2003
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya, 2001
- Mujahir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :Rekesaresan, 2000.
- Kubick, Kathleen. *School-Based Management*. Washington DC: ERIC Clearinghouse on Education Management Eugene OR,1988
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003
- Myers, Dorothy and Robert Stonehill. *School-Based Management*. Office of Research Education Consumer Guide, 1993.
- Nurkolis. *Manajemen Berbasis Sekolah. Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo, 2003
- Oswald, Lori Jo. *School-Based Management: ERIC Digest Number 99*. Eugene: ERIC Clearinghouse on Education Management, 1995
- Peterson, David. *School-Based Management and Student Performance*. ERIC Washington DC: ERIC Clearinghouse , 1991
- Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 104–112.
- Ridwan, M. (2022). Hukum Islam antara Positivisme dan Idealisme. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 147–154.
- Ridwan, M., & Suhar, A. M. (2023). Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(4), 537–547.

- Suhairi, B., Salim, A., & Ridwan, M. (2022). Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 155–163.
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat. Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: Nimas Multima, 2004
- Slamet PH. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jurnal Pendidikan dan kebudayaan no.27 tahun 2000 Supriono. S dan Achmad Sapari. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jawa Timur: SIC, 2001 University Of Southern California. *Study Aims and Study Questions. An International Study of School-Based Managemet*. [http://www.ed.gov/pubs/SER/Sch_Based Mgmt](http://www.ed.gov/pubs/SER/Sch_Based_Mgmt), 2004.
- Wohlstetter, Priscilla dan Susan Albert *Assesment of School-Based Management: Studies of Education Reform*. U.S Department of Education Reform, U.S. Departement of Education Office of Education Research and Improvement, 1996.
- _____. *School-Based Management: Changing Roles for Principals.* (USA: Departement of Education Office of Education Research and Improvement, 1996